

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mulai hadir di Indonesia sejak abad ke-7 M, dan masuk melalui ujung barat Pulau Sumatera, tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Aceh.¹ Kontak awal ini terjadi melalui jalur perdagangan yang intensif antara pedagang Muslim dari Timur Tengah, Persia, India, dan Asia Tenggara dengan masyarakat setempat. Seiring waktu, Islam berkembang pesat dan menyebar ke seluruh Nusantara, yang akhirnya menjadi agama mayoritas di Indonesia. Menurut laporan "*The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*" yang diterbitkan oleh *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC), Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2023, jumlah populasi Muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa, yang merupakan 86,7% dari total populasi nasional yang mencapai 277,53 juta jiwa. Ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pengaruh Islam yang sangat besar, baik secara regional maupun global.²

Perkembangan Islam di Melayu Jambi dari abad ke-9 M hingga ke-15 M terjadi seiring dengan pembentukan struktur politik, pendidikan, dan sosial yang mapan. Proses ini merupakan bagian dari gelombang islamisasi di Nusantara, menggantikan pengaruh sebelumnya yang didominasi oleh agama Hindu-Buddha. Selama periode ini, masyarakat Melayu Jambi berhasil

¹ Islam masuk pertama kali ke Indonesia melalui Pulau Sumatera, bukti secara terdapatnya makam Malik Ash Sholeh penguasa kerajaan Samudera Pasai, Aceh, dalam batu nisan tertulis wafat pada Ramadhan 696 H/ 1297 M. dalam tulisan lain juga mengatakan 96 tahun sebelum Aceh Islam sudah terebih dahulu hadir di Barus, Sumatera Utara berdasarkan Bukti ditemukannya Makam seorang wanita yang bernama Tuhar Amisuri yang wafat 10 Shofar 602 H. lihat: Helmiati, Sejarah Islam Asia Tenggara, (Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim, 2014), h. 25-26, Lihat: Budi Sulistiono, Sejarah masuk dan Berkembangnya Islam Di Nusantara. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39188/2/fulltex.pdf>. Di Akses Pada Tanggal 4 Maret 2024.

²<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/populasi-muslim-indonesia-terbanyak-di-asia-tenggara-berapa-jumlahnya>. Di Akses pada Tanggal 9 Maret 2024

membentuk kerajaan yang kokoh serta sistem pendidikan dan sosial yang terorganisir. Proses islamisasi tersebut juga mempengaruhi struktur politik dan kehidupan sosial mereka secara signifikan. Sebagai bagian dari dinamika islamisasi di Nusantara, pergeseran dari agama Hindu-Buddha ke Islam tidak hanya mencakup aspek agama, tetapi juga mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk tata kelola pemerintahan, pola pendidikan, dan interaksi sosial. ³

Dengan demikian, transformasi ini mencerminkan perubahan yang mendalam dalam masyarakat Melayu Jambi, yang beralih dari landasan agama Hindu-Buddha menuju ajaran Islam, yang pada gilirannya membentuk struktur sosial dan politik yang baru. Dalam Sosial dan Budaya, Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Tradisi keagamaan seperti Maulid Nabi, Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha dirayakan secara luas dan menjadi bagian dari identitas nasional. Nilai-nilai Islam juga tercermin dalam adat istiadat dan hukum adat di berbagai daerah. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, praktik Islam di Indonesia sangat beragam. Ini tercermin dalam berbagai aliran dan organisasi Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang berhaluan tradisional, dan Muhammadiyah yang berhaluan modernis. Keberagaman ini mencerminkan bagaimana Islam di Indonesia telah beradaptasi dengan budaya lokal dan menghasilkan praktik-praktik yang unik. Islam juga mempengaruhi pemerintahan dan hukum di Indonesia. Sebagai contoh, hukum Islam diakui dalam sistem hukum nasional melalui peradilan agama yang menangani kasus-kasus seperti pernikahan, warisan, dan zakat. Selain itu, ada beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, yang menerapkan hukum syariah secara lebih luas.

Pengaruh Islam di Jambi tidak hanya menjadikan Islam sebagai agama mayoritas, tetapi juga telah membawa perubahan pada kehidupan sosial dan budaya, serta eksistensi politik kerajaan-kerajaan besar yang sebelumnya

³ Azyumardi Azra, *Perspektif Islam di Asia Tenggara* (Jakarta : Yayasan Obor, 1994), vi

bercorak Hindu dan Buddha.⁴ Kerajaan Majapahit yang berkuasa dari abad ke-7 hingga ke-14 M di pulau Jawa, yang memiliki pengaruh yang sangat luas, digeser oleh kebangkitan kerajaan Islam Demak.⁵ Begitu pula dengan Kerajaan Sriwijaya yang berkuasa di Sumatera sekitar tahun 670 M,⁶ kejayaannya berhasil diambil alih oleh kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, seperti kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Meurah Silu pada tahun 1267 M,⁷ dan kerajaan Melayu Jambi Islam pada abad ke-14 M.

Sejak kehadiran Islam, Jambi yang sebelumnya merupakan kerajaan Melayu yang bercorak Hindu dan Budha. Perlahan menggeser menjadi kerajaan Melayu Jambi yang bercorak agama Islam. Transformasi dari kerajaan Hindu-Buddha menjadi Kesultanan Jambi menunjukkan adanya pergeseran mendalam dalam "*Habitus*" masyarakat Melayu Jambi. Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek politik dengan terbentuknya kesultanan, tetapi juga mempengaruhi nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik budaya yang dianut oleh masyarakat. Masuknya Islam membawa perubahan dalam tatanan mental dan perilaku masyarakat, menciptakan "*Habitus*" baru yang berpusat pada nilai-nilai dan praktik-praktik Islam. Dalam lingkungan baru ini, ajaran dan tradisi Islam menjadi landasan utama dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Jambi, menggantikan pengaruh sebelumnya dari

⁴ Pengaruh Hindu dan Budha, kemunculannya diperkirakan sudah ada sekitar abad ke-1 Masehi, kemudian baru berkembang sekitar abad 4-6 Masehi. Hal ini ditandai dengan munculnya Kerajaan Ho-lo-tan (430-452) dan Kan-to-li (441-563) dan berdirinya biara-biara Budhis serta pemukiman-pemukiman lamo dikawasan di sepanjang aliran sungai (DAS) Batanghari. Eksistensi ajaran Hindu dan Budha sekitar abad 7 Masehi hingga sampai 11 Masehi dengan munculnya Kerajaan Melayu (Mo-lo-yeu) dan Kerajaan Sriwijaya dan Muara Jambi menjadi Pusat Pendidikan Agama Budha dikawasan Asia Tenggara. Lihat: Anastasia Wiwik Swastiwi, Jambi Dalam Lintasan Sejarah Melayu (abad I - XVII), Penerbit Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang, 2010. 22-23

⁵ M. Chawari,. Pengaruh Islam Sebagai Salah Satu Penyebab Mundurnya Kerajaan Majapahit. Berkala Arkeologi, Volume 13 No. 2, November 1993. 19 <https://doi.org/10.30883/jba.v13i2.574>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2024

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Nusantara_pada_era_kerajaan_Hindu-Buddha. Diakses pada tanggal 3 Maret 2024

⁷ Wiwit Wulandari, dkk, Dinamika Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya: Analisis Faktor-Faktor yang Journal of Indonesian History, Journal of Indonesian History 11 (2),2023. Hal. 9. <file:///C:/Users/userx1/Downloads/76029-Article%20Text-225563-1-10-20231201.pdf>. Di Akses Pada Tanggal 4 Maret 2024.

Hindu-Buddha. Perubahan ini dapat dipahami melalui konsep "*Habitus*" yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu. "*Habitus*" mengacu pada pola-pola perilaku, pemikiran, dan tindakan yang terinternalisasi dalam struktur sosial dan budaya suatu masyarakat.⁸

Proses Islamisasi di Jambi dapat dilihat sebagai transformasi budaya yang berlangsung secara bertahap namun mendalam. Islam tidak hanya diterima sebagai agama, tetapi juga diadopsi ke dalam sistem adat, hukum, dan praktik sosial, yang menjadikan Islam sebagai kerangka budaya. Ini menunjukkan bagaimana islamisasi tidak hanya mengubah kepercayaan masyarakat, tetapi juga struktur sosial dan budaya mereka. Menurut Azyumardi Azra, Jambi adalah salah satu dari daerah awal yang dikunjungi oleh pedagang Muslim Arab. Karena lokasinya yang terletak di persimpangan Selat Malaka, perairan Jambi menjadi tempat yang sangat diminati sebagai pantai komersial utama oleh pedagang dari Cina, India, dan Arab.⁹

Terdapat berbagai versi mengenai masuk dan perkembangan Islam secara resmi di Jambi, beberapa di antaranya menyatakan bahwa Islam secara resmi diperkenalkan di Jambi pada masa pemerintahan Orang Kayo Hitam, yang dikenal sebagai raja pertama dengan gelar Rajo Melayu Islam Tanah Pilih, namun, ada juga pandangan yang menyebut bahwa Islam menjadi agama resmi di Jambi saat masa pemerintahan Sultan Agung Abdul Qahar, yang merupakan Raja Jambi pertama yang bergelar sultan.¹⁰ Meskipun ada beragam pendapat dan asumsi dari para peneliti, pengkaji, dan penulis sejarah islamisasi di Jambi mengenai masuk, pertumbuhan, dan perkembangan Islam, terutama di wilayah cekungan Sungai Batang Hari atau Tanah Pilih yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Jambi, satu hal yang jelas adalah dengan masuknya dan

⁸ Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*. (London: Cambridge University Press, 1977). 82

⁹ B. J. O. Schrieke, *Indonesia Sociological Studies, Part One*, (Den Haag dan Bandung: Van Hoeve, 1955). 13

¹⁰ Muchtar Agus Cholif, *Timbul Tenggelam Persatuan Wilayah Liak XVI Tukap Tuhut di Bumi Undang Tambang Teliti*, (Jambi: [t.p]), hal. 79.

perkembangan Islam di Jambi, terbentuklah entitas politik Islam dalam bentuk pemerintahan kesultanan, dengan para raja yang bergelar Sultan.

Dengan demikian, agama Islam tidak hanya menjadi aspek spiritual dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi, tetapi juga meresap dalam struktur pemerintahan dan hukum, mencerminkan kedalaman pengaruhnya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam Undang-undang Jambi, yang merupakan kumpulan aturan yang digunakan oleh pihak Kesultanan Jambi untuk mengatur roda pemerintahan, terdapat dua bagian utama: hukum adat dan hukum syarak. Hal ini menunjukkan pentingnya kedua aspek tersebut dan betapa mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹¹

Pandangan yang menyatakan bahwa Islam telah menjadi agama resmi pada masa kerajaan sebelumnya, namun pengaruhnya terhadap struktur pemerintahan baru mulai tampak secara signifikan pada masa Sultan Agung. Pada periode ini, penerapan nilai-nilai Islam dalam struktur kerajaan semakin mendalam dan memengaruhi berbagai aspek administrasi serta kebijakan kerajaan.¹² Islam telah ada dan dianut oleh raja, kalangan istana, dan rakyat Kerajaan Jambi sejak abad ke-15 M. Namun, keislaman tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pemerintahan dan sistem pemerintahannya hingga abad ke-17 M, ketika Sultan Agung Abdul Qahar memperkuat status Islam sebagai agama resmi Kesultanan Jambi dengan perubahan gelar penguasa dan nama kerajaan menjadi Kesultanan Jambi. Teori yang diajukan oleh Uka Tjandrasasmita mengenai peran sultan dalam islamisasi menyatakan bahwa jika seorang bangsawan memeluk agama baru, maka rakyat akan mengikutinya, karena raja atau sultan dipandang sebagai perwakilan Tuhan di bumi.¹³

¹¹ Ngebi Sutho Dologo Priyai Rajo Sari, *Undang-undang dan Pencacahan Jambi, Lembaga Adat Melayu Jambi*, 2023.

¹² Ona Yulita dan Deki Syaputra ZE, "Islamisasi di Kerajaan Jambi", *Jurnal Istoria* Vol. 3 No. 2 Sptember 2019, hal. 109

¹³ Uka Tjandrasasmita, *Arkeologi Islam Nusantara*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1986). 24.

Islam telah diakui sebagai agama resmi kerajaan, namun pengaruh kepercayaan sebelumnya seperti Animisme, Dinamisme, serta agama Hindu-Buddha masih tetap kuat, terutama di kalangan masyarakat pedalaman atau dataran tinggi Jambi, seperti di Kerinci. Beberapa pandangan menyebutkan bahwa Islam mulai menyebar ke Kerinci sekitar abad ke-13 M melalui para pendakwah yang dikenal sebagai Siak (Syekh), yang terdiri dari tujuh orang, termasuk Siak Lengih di Koto Pandan Sungai Penuh, Siak Rajo di Kemantan, Siak Ali di Semurup, dan Siak Jelir di Siulak, serta lainnya. Namun, ada juga pandangan yang berpendapat bahwa proses islamisasi di Kerinci dipengaruhi oleh Kesultanan Jambi, yang mengirim surat-surat kepada Depati di Kerinci untuk meninggalkan kebiasaan dan kepercayaan lama serta memeluk Islam dengan menerima hukum syariat Islam.¹⁴

Setelah pengaruh Hindu Budha mundur dan tenggelam dari ruang kekuasaan dalam peradaban Melayu Jambi, Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai identitas kultural bagi masyarakat Jambi.¹⁵ Dengan meminjam istilah yang digunakan oleh Rahayu Zami dalam analisisnya tentang perkembangan peradaban Islam, dapat dikatakan bahwa "Keberadaan Orang Melayu Selalu Terkait dengan Islam", ia menuliskan pada bagian judul artikelnya dengan kalimat "Orang Melayu Pasti Islam".¹⁶ Sepanjang perkembangan Islam di wilayah Melayu, dapat disimpulkan bahwa identitas Melayu selalu terkait erat dengan Islam. Ini menunjukkan bahwa dunia Melayu secara intrinsik terhubung dengan ajaran Islam, dan Budaya Melayu tercermin sebagai bagian integral dari Budaya Islam. Keberadaan Islam bagi masyarakat Jambi merupakan bagian integral dari sejarah dan kehidupan mereka, mulai dari masuknya Islam di Jambi hingga masa kini. Hukum Islam, seperti hukum halal dan haram, boleh dan tidak boleh, makruh, dan wajib, menjadi ukuran

¹⁴ Watson, "Islamization in Kerinci", *Change and Continuity in Minangkabau: Local, Regional and Historical Perspectives on West Sumatra*, (Ohio Univesity, 1985). 162

¹⁵ Elsbeth Locher-Scholten, *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial (Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, (Jakarta: Banana KITLV, 2008). 38.

¹⁶ Rahyu Zami, "Orang Melayu Pasti Islam: Analisis Perkembangan Peradaban Melayu", (*Jurnal Islamika* 2 (1): 66-81 2019), hal. 66

dalam hampir semua aspek kehidupan. Sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari juga cenderung mengacu pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam.¹⁷

Islam telah menjadi identitas dominan di Jambi, tetapi proses ini tidak menghilangkan seluruh unsur budaya lokal pra-Islam. Sebaliknya, banyak elemen budaya lokal diadaptasi dan diberi makna baru sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, upacara adat yang sebelumnya terkait dengan kepercayaan animisme atau Hindu-Buddha, direformulasi dalam kerangka Islam, menjaga kesinambungan budaya sambil menyesuaikannya dengan keyakinan baru. Dalam masyarakat Jambi, budaya Melayu tidak hanya dipandang sebagai warisan leluhur, tetapi juga sebagai refleksi dari ajaran Islam. Praktik budaya seperti adat istiadat, upacara keagamaan, dan sistem sosial sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam. Sebagai contoh, dalam adat pernikahan Melayu Jambi, nilai-nilai Islam seperti mahar, akad nikah, dan peran wali menjadi elemen penting dan terintegrasi dalam upacara adat. Hukum Islam, seperti halal dan haram, boleh dan tidak boleh, makruh, dan wajib, menjadi pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jambi. Prinsip-prinsip ini berlaku tidak hanya dalam ibadah atau ritual keagamaan, tetapi juga dalam urusan sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, hukum halal menentukan konsumsi makanan masyarakat, sementara dalam transaksi ekonomi, prinsip syariah seperti larangan riba diikuti secara ketat.

Di banyak negara, proses pembangunan politik nasional cenderung mengikuti arah sekularisasi. Namun, di Indonesia, setiap kebijakan atau keputusan politik yang diambil harus mempertimbangkan otoritas keagamaan, terutama yang berkaitan dengan Islam, dan tidak bisa diabaikan.¹⁸ Di era Indonesia merdeka, Islam masih dipelihara fungsinya sebagai tolok ukur moralitas dan tingkah laku bagi umat Islam bahkan bagi masyarakat

¹⁷ As'ad Isma, Peran Sosial Tuan Guru dalam Masyarakat Seberang Kota Jambi: Satu Tinjauan Ulang, *KONTEKSTUALITA*, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Vol. 34 No. 2, Desember 2017. Hal. 41

¹⁸ WF. Wertheim, *Indonesian Society in..h.* 207.

Indonesia.¹⁹ Dan acapkali pula Islam menjadi dalil legitimasi dalam hal pengambilan kebijakan publik dan bahkan menjadi legitimasi terhadap proses pembangunan politik, terutama masalah-masalah prinsip seperti persoalan dasar negara, kekuasaan, dan otoritas. Meskipun dasar Negara adalah Pancasila, tapi selalu saja dicarikan pembenaran dan persesuaian dengan Islam agar mendapat legitimasi dan dukungan dari rakyat dan tokoh Islam di Indonesia.²⁰ Tanpa legitimasi dari Islam, melalui tokoh-tokohnya, proses pembangunan politik atau pada pembangunan nasional pada umumnya tidak akan berjalan secara efektif. Ini menunjukkan keunikan sistem sosio-kultural dan politik bangsa Indonesia.

Peran Islam di Indonesia sangat vital, meskipun tidak diakui secara formal, Islam memberikan kontribusi dan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara ini. Keunikan ini menandai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbeda dari negara-negara lain di dunia, termasuk negara-negara Muslim lainnya. Jargon "Indonesia bukan negara agama tapi juga bukan negara sekuler" sering digunakan untuk menggambarkan model negara Republik Indonesia yang khas. Pancasila adalah model yang khas sebagai pandangan hidup dan ideologi negara, menempatkan Indonesia dalam posisi yang sangat unik dalam hal model negara.²¹ Pancasila merupakan hasil sintesis politik yang menyatukan berbagai kepentingan kebangsaan yang beragam, baik dari segi agama maupun etnis, dan mampu mewakili aspirasi mayoritas tanpa mengabaikan keberadaan kelompok minoritas.

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam sistem politik, kekuatan legitimasi dan otoritas agama mengalami penurunan, meskipun pengaruh dan otoritas tersebut belum sepenuhnya menghilang. Saat

¹⁹ Undang-undang anti pornografi dan pornoaksi merupakan bukti kongkret betapa Islam kerap dijadikan tolok ukur dalam hal moralitas kebangsaan bahkan masuk hingga pada aspek normatif seperti undang-undang.

²⁰ Sabara Nuruddin, "Islam dalam Lanskap Ideologi dan Politik NKRI" dalam Jurnal Pappasang. Volume I Nomor 1 tahun 2013 h. 1.

²¹ Sabara Nuruddin, "Islam dalam Lanskap...", h. 2.

ini, kekuatan dan otoritas agama dalam mempengaruhi dinamika sosial politik lebih terletak pada konteks dan pengaruh kulturalnya. Otoritas agama (Islam) tetap memiliki pengaruh signifikan melalui tokoh-tokohnya dalam mempengaruhi opini dan pilihan publik. Bryan S. Turner menjelaskan bahwa secara historis, agama telah mendukung kelas penguasa dalam mempertahankan kekuasaan politik. Namun, dalam masyarakat modern (kapitalis), dukungan ini tidak lagi menjadi syarat mutlak. Kepatuhan politik dapat terus dipertahankan meskipun tanpa adanya tuntutan dan aturan yang secara eksplisit sah.²²

Peran aktif ulama dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan faktor kunci dalam perkembangan Islam di Nusantara, dan peran ini sudah ada sejak zaman sahabat Rasulullah.²³ Ulama tidak hanya berperan dalam bidang pendidikan, moral, dan keagamaan, tetapi seringkali memiliki pengaruh yang meluas ke berbagai aspek kehidupan.²⁴ Peran aktif ulama dalam kehidupan sosial masyarakat Nusantara telah menjadi faktor kunci dalam penyebaran dan perkembangan Islam sejak zaman awal masuknya agama ini ke wilayah tersebut. Ulama, sebagai pemimpin spiritual dan intelektual, telah memainkan peran sentral dalam membimbing masyarakat, menyebarkan ajaran Islam, dan membentuk tatanan sosial yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

Ulama yang datang ke Nusantara, termasuk yang mengikuti jejak para sahabat Rasulullah, memulai misi dakwah mereka dengan mengajarkan prinsip-prinsip dasar Islam kepada penduduk lokal. Mereka menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan yang damai, yang sering kali melibatkan dialog dan penyesuaian dengan budaya setempat. Ulama berperan sebagai guru yang mengajarkan ilmu agama, mulai dari tauhid, fiqh, hingga tasawuf.

²² Bryan S. Turner, *Religion and Social Theory* Diterjemahkan oleh Inyik Ridwan Muzirdengan judul *Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer* (Yogyakarta: IRCISOD.2003. h. 384.

²³ Republika, Peran Ulama dalam Islam, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/04/28/p7uvi1335-peran-ulama-dalam-islam>. di Akses pada Tanggal 5 Maret 2019, Jam 09.25

²⁴ Abu Baker A. Bagader, (ed.), *The Ulama in the Modern Muslim Nation-State*, (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement in Malaya, 1983

Mereka mendirikan pesantren, surau, dan majelis taklim sebagai pusat pendidikan dan penyebaran ilmu, yang menjadi fondasi bagi perkembangan masyarakat Muslim di Nusantara. Ulama juga berfungsi sebagai penengah dalam konflik sosial dan politik di masyarakat. Mereka dihormati oleh berbagai kalangan dan sering kali dipanggil untuk memberikan nasihat atau menyelesaikan perselisihan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan Islam. Dalam menghadapi tantangan eksternal, seperti kolonialisme, ulama sering kali menjadi pemimpin dalam gerakan sosial dan perlawanan. Mereka mengorganisir masyarakat untuk mempertahankan identitas dan kedaulatan, baik secara fisik maupun spiritual.

Ulama memainkan peran krusial dalam membentuk identitas Islam yang khas di Nusantara dengan sering menyesuaikan ajaran Islam dengan tradisi lokal. Proses ini menghasilkan bentuk Islam yang inklusif dan diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, yang dikenal sebagai "Islam Nusantara." Selain itu, ulama juga berperan dalam mengintegrasikan hukum Islam (syariah) dengan hukum adat setempat. Mereka menjadi sumber utama dalam pengambilan keputusan hukum yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, mulai dari masalah pernikahan hingga urusan warisan. Hingga saat ini, ulama terus memegang peran penting dalam menjaga dan meneruskan tradisi ilmu dan moralitas Islam di Nusantara. Mereka tidak hanya mengajar di lembaga pendidikan agama, tetapi juga aktif dalam memberikan bimbingan moral kepada masyarakat di tengah dinamika modernisasi. Secara keseluruhan, peran ulama dalam kehidupan sosial masyarakat Nusantara telah menjadi pilar utama dalam perkembangan Islam, yang tidak hanya membentuk identitas keagamaan, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial, budaya, dan politik di wilayah ini.

Bagi masyarakat, sosok ulama merupakan faktor kunci dalam keberlangsungan kehidupan beragama. Ulama tidak hanya berperan sebagai pemimpin dalam ritual keagamaan, tetapi juga sebagai tempat untuk mencurahkan berbagai masalah dan keluh kesah yang dihadapi masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, ulama sering dijadikan rujukan untuk mencari

solusi atas berbagai persoalan, mulai dari masalah keluarga, pendidikan, jodoh, pemilihan waktu untuk memulai pekerjaan, hingga isu-isu politik. Karena pengetahuan agamanya yang mendalam, ulama dianggap sebagai "guru" dalam hal ilmu batin (esoterik) dan ilmu lahir (eksoterik). Sejarah menunjukkan bahwa gelar ulama diperoleh melalui proses yang tidak mudah.²⁵

Kedudukan sosial ulama sangat tinggi, menjadikannya bagian dari elit agama dan tokoh yang sangat diperhitungkan. Sebagai tokoh agama, ulama memiliki kharisma yang berasal dari hubungan sosial yang konsisten dalam masyarakat. Suzanne Keller melihat tokoh agama sebagai elit dengan peran ganda sebagai pengambil keputusan dan objek sosial, dengan tiga peran utama: pertama, memiliki wewenang dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan; kedua, mendukung kekuasaan moral; dan ketiga, terkenal, sukses, dan berderajat tinggi. Seorang tokoh agama diharapkan dapat membangun citra publik yang memudahkan hubungan simbolis antara dirinya dan masyarakat. Selain itu, tokoh agama sering kali menjadi model kolektif dan mencerminkan ambisi, harapan, serta dinamika masyarakat.²⁶

Sejarah kelahiran bangsa ini menunjukkan bahwa agama memiliki peran yang mendalam dalam arena politik. Agama tidak hanya ditempatkan dalam konteks sakral dan ritualistik, tetapi juga diintegrasikan dalam aspek politik kehidupan di Indonesia. Pada masa pembentukan Negara Indonesia, agama, khususnya Islam, tidak muncul dalam bentuk formalitas, melainkan dalam bentuk Islam politik yang menekankan nilai-nilai dan substansi universal. Pendekatan ini membuat Pancasila diterima oleh mayoritas tokoh ulama dan umat Islam, yang dengan sukarela menyetujui penghapusan delapan kata pada Piagam Jakarta.²⁷

²⁵ Hasanatul Jannah, "Kyai, Perubahan Sosial, dan Dinamika Politik Kekuasaan" dalam *Jurnal Fikrah* Volume 3 Nomor 1 tahun 2015. 158.

²⁶ Suzanne Killer, *Penguasa dan Kelompok Elit Penentu dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). 213.

²⁷ Delapan kata tersebut adalah, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", kalimat tersebut diubah pada sidang konstitusi 18 Agustus 1945 menjadi, "Ketuhanan yang Maha Esa."

Pada masa penjajahan Belanda, ulama turut aktif dalam perjuangan untuk memelihara, mempertahankan, dan bahkan mengartikulasikan identitas dan ciri khas rakyat Indonesia, sambil menentang kekuasaan kolonial Belanda.²⁸ Kehadiran Belanda di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk eksploitasi ekonomis, tetapi juga membawa misi agama (kristenisasi).²⁹ Dalam upaya mempertahankan eksistensi Islam, banyak ulama yang secara langsung memimpin umat dalam peperangan melawan penjajahan Belanda. Hampir semua perlawanan di Nusantara pada masa itu dipimpin oleh tokoh ulama. Sebagai contoh, perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajahan Belanda pada tahun 1881 dimeriahkan oleh tokoh ulama Chik Di Tiro Muhammad Saman.³⁰ Pada masa penjajahan Belanda, ulama di Indonesia memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas dan ciri khas bangsa, sambil secara aktif menentang kekuasaan kolonial. Ulama sering kali menjadi pemimpin dalam berbagai gerakan perlawanan terhadap Belanda. Mereka menggunakan pengaruh mereka untuk menggerakkan masyarakat melawan ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Gerakan seperti Perang Padri di Sumatra Barat dan perlawanan ulama di Jawa adalah contoh nyata dari keterlibatan ulama dalam perjuangan melawan kolonialisme. Dalam beberapa kasus, ulama mengeluarkan fatwa atau seruan jihad (perang suci) untuk melawan Belanda. Mereka menekankan bahwa melawan penjajahan adalah bagian dari kewajiban agama, yang membantu memobilisasi masyarakat secara luas untuk ikut serta dalam perjuangan.

Ulama juga berperan dalam membangun kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia. Mereka mengartikulasikan gagasan tentang kebangsaan dan kedaulatan yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Kesadaran ini menjadi dasar bagi gerakan nasionalisme yang kemudian berkembang di awal abad ke-20.

²⁸ WF. Wertheim, *Indonesian Society in Transition: a Study of Social Change* (Bandung: Van Hove Ltd, 1996), h. 205.

²⁹ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm.32. Lihat juga Th. van den End, *Ragi Carita 1; Sejarah Gereja di Indonesia 1500—1860*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), hlm. 28

³⁰<https://kumparan.com/acehkini/mengenal-pahlawan-nasional-dari-aceh-1sDxueOCLYd/full>. di Akses pada Tanggal 04 September 2021. Jam. 11.23

Ulama tidak hanya melawan penjajahan fisik, tetapi juga dominasi budaya Barat yang dibawa oleh Belanda. Mereka menolak asimilasi budaya Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal, dan berupaya menjaga kemurnian ajaran agama serta identitas budaya masyarakat Indonesia. Ulama sering mengkritik kebijakan-kebijakan kolonial yang dianggap merugikan rakyat, baik dalam khotbah, tulisan, maupun dalam berbagai forum. Kritik ini sering kali bersifat moral dan religius, menekankan ketidakadilan serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia.

Peran ulama dalam masa penjajahan Belanda memberikan warisan penting bagi pembentukan karakter bangsa Indonesia yang berani, religius, dan memiliki kesadaran kuat terhadap identitas nasional. Warisan ini kemudian menjadi salah satu fondasi dalam perjuangan kemerdekaan yang berhasil pada tahun 1945. Setelah kemerdekaan, pengaruh ulama dalam sistem sosial dan politik Indonesia tetap kuat. Mereka terus berperan dalam menjaga moralitas publik dan memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap menjadi bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara keseluruhan, ulama di masa penjajahan Belanda tidak hanya terlibat dalam perjuangan fisik melawan kolonialisme, tetapi juga dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas keagamaan, budaya, dan nasional rakyat Indonesia. Peran mereka yang berkelanjutan menjadi salah satu pilar penting dalam sejarah perjuangan bangsa.

Perubahan zaman tidak menghambat perubahan dalam perjuangan, karena Islam adalah agama yang dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi zaman. Perubahan ini tercermin dalam perjuangan ulama, di mana gerakan ulama tidak hanya bersifat personal tetapi juga bisa berwujud dalam gerakan sosial.³¹ Pengaruh dalam Organisasi Sosial dan Politik pada awal abad ke-20, ulama terlibat dalam pembentukan organisasi sosial dan politik yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan, seperti Sarekat Islam.

³¹ Gerakan Sosial yaitu gerakan yang merupakan hasil perilaku kolektif, yaitu sebuah perilaku yang bersama-sama oleh sejumlah orang yang bersifat rutin dan perilaku mereka merupakan hasil tanggapan atau respon terhadap rangsangan tertentu. Lihat: Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012,

Mereka menggabungkan nilai-nilai Islam dengan ide-ide modern tentang kebangsaan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Lahirnya organisasi keislaman di Indonesia pada akhir abad ke-19 hingga 20 M³² adalah bukti dari dinamisnya ulama dalam menjalankan misi kenabian sebagai pewaris Nabi. Meskipun setiap gerakan dan organisasi memiliki latar belakang, pemahaman keislaman, dan orientasi yang berbeda-beda, namun tujuan mereka tetap sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan memperbaiki kondisi masyarakat.³³ Umumnya, gerakan sosial yang dipelopori oleh ulama hadir sebagai respons terhadap keterpurukan umat Islam dan merupakan wujud dari pelaksanaan misi kenabian dalam upaya perubahan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.³⁴

Dari sudut pandang historis-sosiologis, ulama di Indonesia telah memainkan peran yang sangat luas dan beragam; tidak hanya terbatas pada

³² Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi dan berubah menjadi Serikat Islam pada tahun 1912 oleh H.O.S. Tjokroaminoto. Gerakan Muhammadiyah oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H). Nahdlatul Ulama (NU) lahir pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di Kota Surabaya. Yang dipimpin oleh K.H. Hasjim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

³³ Ada tiga model corak kebangkitan Islam di Asia Tenggara (Indonesia). Pertama Corak Modernisme, dengan tokoh-tokohnya Jalaluddin al-Afgani, Rasyid Ridho, Muhammad Abduh. Modernisme lahir adanya pertemuan antara nilai-nilai Islam dan peradaban Barat. artinya merujuk kepada ur'an dan hadits dengan pendekatan kontekstual. Kedua Corak Revivalisme. Yaitu pentingnya mengembangkan ijtihad agar keluar dari taklik terutama bertumpuh pada fiqih; anti pada perkembangan intelektualisme yang berakar pada pemikiran Barat dan kalam atau teologi yang dikembangkan oleh Ibnu Sina, kembali kepada al-Qur'an dan Hadits dan kembali kepada pemahaman Islam yang ada zaman rasul dan Khulafaurrasyyidin. Dengan tokohnya Muhammad bin Abdul Wahab, di Indonesia dilanjutkan oleh 3 haji di Minangkabau, yaitu H. Sumanik, H. Piobang, dan Tuanku Nan Renceh. Ketiga Corak Tradisionalisme, yaitu perlu menanamkan diri dalam spirit pengalaman transendental dalam praktek keagamaan seperti tasawuf (estetik). mengapresiasi berkembangnya tasawuf Amali (sunnah) dan tasawuf Falsafi (syi'i) dan juga tarekat; mentoleransi kesesuaian antar adat istiadat yang berkembang di masyarakat dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Qur'an dan sunnah Nabi dengan pendekatan yang lebih bersifat kontekstual dan lebih memiliki keraifan terhadap kebudayaan loka; serta tetap menfokuskan pentingnya mengembangkan ijtihad. Dengan tokohnya Sayyid Muhammad Naquib al-Attas.. lihat. Abdul Ghofur, Kebangkitan Islam Di Indonesia (Tela'ah Tentang Munculnya Ormas Islam Awal Abad 20 M). TOLERANSI, Vol.4 No.2, Juli-Desember 2012. Hal. 118-119

³⁴ Samsul Arifin, Agama Sebagai Instrumen Gerakan Sosial (Malang: Universitas Muhamaddiyah) 39-71

aspek agama, pendidikan, kebudayaan, dan sosial kemasyarakatan, tetapi juga telah merambah ke aspek ekonomi dan politik.³⁵

Najib Kailani mengatakan bahwa:

“Ulama telah lama membuktikan diri sebagai aktor penting yang berpengaruh secara politis, sosiologis dan kultural terhadap dinamika historis masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah artikulasi dan interpretasi mereka terhadap relasi agama dan negara”.³⁶

Setidaknya ada tiga alasan mengapa Ulama selalu terlibat dan tidak terlepas dari politik. Pertama, ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, sosial, dan politik, sehingga Ulama secara alamiah terlibat dalam menangani berbagai masalah tersebut. Kedua, sebagai pemuka agama yang memiliki pengikut dan pengaruh yang luas di masyarakat, Ulama seringkali menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, menyelesaikan masalah sosial, serta memajukan pendidikan dan ekonomi. Ketiga, dalam sejarah, Ulama telah memainkan peran penting dalam politik, mulai dari perlawanan terhadap penjajahan hingga masa setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.³⁷

Dalam masyarakat Jambi, ulama merupakan tokoh yang menduduki posisi tertinggi dalam hierarki kehidupan sosial dan budaya. Seorang ulama selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan, baik yang berkaitan dengan aspek sosial keagamaan maupun politik. Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 10-19 Oktober 2018 menunjukkan bahwa tokoh agama, termasuk ulama, pastor, dan biksu,

³⁵ Fatimah Zuhrah, Pergeseran Peran Dan Posisi Ulama Pada Masyarakat Melayu Di Tanjung Pura Kabupaten Langkat, HIKMAH, Vol. XII, No. 1, 2016. Hal. 90

³⁶ Najib Kailani, dkk, Meneroka Wacana Islam Publik dan Politik Kebangsaan Ulama di Kota-kota Indonesia, didalam ULAMA, POLITIK, DAN NARASI KEBANGSAAN: Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-kota Indonesia, Jogjakarta, Penerbit: Pusat Pengkajian Islam Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDeP), Cetakan I, 2019, hal. XIX.

³⁷ Koiruddin, Politik Kiai (Polemik Keterlibatan Kiai dalam Partai Politik) (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2005), h.46.

merupakan profesi yang paling didengar dan diperhatikan imbauannya oleh masyarakat jika dibandingkan dengan profesi lainnya.³⁸

Ulama adalah salah satu figur yang sangat dihormati dan dipatuhi dalam masyarakat. Ulama sering dimintai pendapat tentang berbagai hal, mulai dari masalah ritual-spiritual hingga persoalan politik. Kehadiran ulama dianggap memiliki peran penting dalam pelaksanaan proses demokrasi di tingkat lokal di Provinsi Jambi. Kepatuhan masyarakat terhadap ulama karena besarnya peran ulama dalam kehidupan sosial. Ulama tidak hanya terlibat dalam ritual keagamaan, seperti acara pernikahan, khitanan, dan peringatan hari besar Islam, tetapi juga sering dipercaya masyarakat Jambi dalam bidang pengobatan berbagai penyakit. Hal ini menunjukkan bahwa ulama memiliki ikatan sosial dan emosional yang kuat dengan masyarakat. Dalam pepatah adat Jambi, ulama disebut sebagai "pegi tempat betanyo, balik tempat beberito", yang berarti bahwa ulama adalah orang yang dipercaya masyarakat untuk bertanya tentang hal-hal penting yang terjadi di tengah masyarakat.³⁹

Pada masa penjajahan, ulama aktif dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Perjuangan rakyat Jambi melawan penjajahan Belanda yang dipimpin oleh Sultan Thaha Saifuddin didukung oleh ulama-ulama baik secara langsung maupun tidak langsung. Setelah kemerdekaan, para ulama di Jambi tetap aktif dalam proses integrasi Jambi menjadi bagian dari Provinsi Negara Indonesia. Penting bagi peneliti untuk meneliti lebih dalam mengenai hubungan ulama dengan negara, terutama dari masa kerajaan Islam Melayu Jambi hingga era penjajahan Belanda, serta peran ulama dalam pembentukan Jambi sebagai provinsi.

³⁸Dalam surveinya Denny JA mengungkapkan, ada 51,7 persen responden yang memilih lebih dengar imbauan tokoh agama, sedangkan 11 persen responden lebih mendengar imbauan politikus, <https://tirto.id/lsi-denny-ja-mayoritas-masyarakat-lebih-mendengar-imbauan-ulama-c97A>. Di Akses pada Tanggal. 13 Desember 2019

³⁹ As'ad Isma, Peran Sosial Tuan Guru dalam Masyarakat Seberang Kota Jambi: Satu Tinjauan Ulang, KONTEKSTUALITA, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Vol. 34 No. 2, Desember 2017. Hal. 48

Peran ulama sebagai tokoh masyarakat di Provinsi Jambi memungkinkan mereka untuk mempengaruhi dan menjadi penggerak bagi santri dan masyarakat di lingkungannya. Oleh karena itu, peran ulama di Provinsi Jambi seringkali terkait dengan hal-hal yang bersifat politik, karena mereka memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat terhadap isu-isu politik.⁴⁰ Peran ulama dalam sejarah Jambi tidak terbatas pada aspek sosial keagamaan, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam bidang sosial politik. Keterlibatan ulama dalam politik telah terjadi sejak zaman perjuangan kemerdekaan hingga masa kini. Contohnya, K.H. Kemas Abdussomad, yang selain mendirikan Partai NU Jambi, juga menjabat sebagai Ketua Rois Am Syuriah. Begitu pula dengan KH Qadir Ibrahim, yang menjadi ketua tandfiziah pada tahun 1952 dan anggota DPRD ST dari tahun 1946 hingga 1957. K.H. Raden Usman Dung, yang pernah menjabat Wakil Ketua DPRD-GR dengan partai politik dari Nahdlatul Ulama pada tahun 1967 hingga 1971, dan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bungo – Tebo pada tahun 1982 hingga 1992 mewakili Golkar. Di era kontemporer, kontestasi ulama di Jambi diwakili oleh tokoh seperti K.H. Abdullah Sani dan K.H. Anwar Sadat. K.H. Abdullah Sani, misalnya, pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Jambi pada periode 2013–2018 dan saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jambi untuk periode 2021–2024.⁴¹ Sedangkan K.H. Anwar Sadat, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Baqiyatush Shalihat 2009, memenangkan Pilkada Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2021–2024.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan sejarah Jambi, keterlibatan ulama dalam kontestasi politik telah menjadi sebuah pola yang konsisten. Dalam setiap kontestasi politik praktis lokal di Jambi, ulama-ulama tersebut memainkan peran yang sangat strategis dalam memengaruhi masyarakat dan menentukan arah dinamika kontestasi politik di Jambi. Pengaruh ulama tidak hanya terbatas pada membangun opini publik, tetapi

⁴⁰ Muhandisun Mi'mari, POLITIK KIAI (Studi Kasus Praktik Politik Kiai pada Pilgub Provinsi Jambi

Tahun 2015), Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.h. 8

⁴¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Sani. Di Akses Pada Tanggal 12 Maret 2024

juga mencakup penentuan pilihan politik masyarakat dalam setiap kontestasi politik praktis.

Seiring perkembangan zaman dan perubahan sosial, penelitian yang dilakukan oleh As'ad Isma menunjukkan adanya penurunan pengaruh ulama di Jambi seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Peran ulama, yang sebelumnya sangat dominan dalam bidang keagamaan dan sosial politik, kini mengalami pergeseran bertahap. Faktor-faktor seperti diferensiasi sosial, spesialisasi fungsi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang komunikasi, berkontribusi terhadap perubahan ini. Akibatnya, peran kepemimpinan dan otoritas keilmuan yang dulunya dipegang oleh Tuan Guru kini tersebar kepada figur lain yang memiliki keahlian dan kompetensi lebih spesifik di bidangnya.⁴²

Dalam dinamika zaman, peran sosial ulama telah mengalami pergeseran signifikan. Ulama kini menjadi representasi dari lapisan sosial baru, di mana profesi ulama telah menjadi bagian dari kelompok sosial elit. Kelompok pemuka agama, dengan warisan integritas dan reputasi yang baik dari ulama-ulama masa lalu, terlibat secara aktif dalam mengendalikan kehidupan masyarakat Muslim dan seringkali ditempatkan sejajar dengan para pejabat publik. Mereka memegang kuasa moral dan intelektual yang kuat.

Dalam konteks Indonesia, peran ulama di Jambi mengalami perubahan yang signifikan. Respons masyarakat terhadap ulama saat ini berbeda dari sebelumnya, dan kemungkinan adanya sirkulasi ulama di masa yang akan datang di Jambi juga akan mengalami perubahan yang mungkin tidak terduga. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan tentang dinamika politik ulama di Jambi. Peneliti melakukan penelitian untuk menelaahnya secara lebih mendalam dengan mengeksplorasi peran politik ulama di Jambi sepanjang sejarah, mulai dari hubungan agama dan negara pada masa kerajaan Melayu Jambi hingga periode kemerdekaan dan pembentukan Jambi sebagai bagian dari provinsi di Indonesia dalam

⁴² As'ad Isma, Peran Sosial Tuan Guru dalam Masyarakat Seberang Kota Jambi: Satu Tinjauan Ulang, Hal. 68

konteks peran politik ulama. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat tema ini dalam penelitian yang berjudul “RELASI AGAMA DAN NEGARA (Peran Politik Ulama Dalam Pembentukan Propinsi Jambi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka pokok masalah dirumuskan sebagai berikut, kemudian dikembangkan ke dalam tiga submasalah: yaitu:

1. Bagaimana Dinamika Umat Islam dan Kelembagaan Islam di Jambi: Persektif Sejarah?
2. Bagaimana Relasi Ulama dan Negara pada Masa Kesulthanan hingga terbentuknya Propinsi Jambi?
3. Bagaimana Peran Politik Ulama dalam Pembentukan Propinsi Jambi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disertasi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji Dinamika umat Islam dan kelembagaan Islam di Jambi: persektif sejarah.
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji relasi ulama dan negara pada masa Kesulthanan hingga terbentuknya Propinsi Jambi
- 3) Untuk mengetahui dan mengkaji peran politik ulama dalam pembentukan Propinsi Jambi.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Secara Teoretis
 - 1) Hasil penelitian ini akan menjadi kontribusi bagi pengembangan khazanah ilmiah, terutama dalam bidang studi agama-agama.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga dalam lingkup akademik, terutama bagi mahasiswa jurusan studi agama-agama.
 - 3) Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi penting bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian

tentang hubungan antara agama, negara, dan masyarakat dalam konteks Pengembangan Pemberdayaan Umat.

2. Secara praktis

- 1) Untuk membangun kesadaran tentang peran dan pengaruh besar ulama dalam kancah perpolitikan di Indonesia.
- 2) Untuk membangun kesadaran tentang kontestasi politik yang memperhatikan nilai etika politik Islam.
- 3) Sebagai acuan akademik bagi penelitian selanjutnya sekaligus menambah khazanah literatur ilmiah yang berkaitan dengan relasi ulama, politik, dan Negara khususnya di Jambi.

E. Kerangka Berpikir

Tidak dapat disangkal bahwa dalam perjalanan sejarah Islam, politik memainkan peran yang sangat signifikan, baik pada masa awal kelahirannya maupun dalam konteks modern kontemporer saat ini.⁴³ Partisipasi tokoh agama seperti kyai dan ustadz dalam ranah politik bukanlah hal yang asing atau fenomena baru dalam sejarah politik di Indonesia. Nabi Muhammad SAW, sebagai sosok teladan umat Islam, tidak hanya dianggap sebagai pemimpin agama tetapi juga sebagai pemimpin negara (politikus) selama hidupnya. Pada masa kekhalifahan setelah wafatnya Rasulullah SAW, dimana proses pemilihan kepemimpinan dalam setiap pergantian khalifah menjadi jelas. Meskipun istilah "ulama" tidak secara eksplisit digunakan untuk menggambarkan khalifah-khalifah seperti Abu Bakar, Umar Ibn Khattab, Utsman Ibn Affan, dan Ali Ibn Abi Thalib, namun keilmuan dan ketakwaan mereka dalam hal keagamaan menjadi ciri khas utama yang tidak dapat disangkal dari kepemimpinan mereka.

Dari perspektif ajaran, dalam Islam tidak ada larangan atau keharaman bagi ulama untuk terlibat dalam politik. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ahmad Syalabi, Islam adalah agama yang komprehensif, yang tidak hanya menangani masalah keagamaan tetapi juga masalah duniawian. Secara luas,

⁴³Didin Saefuddin Buchori, Sejarah Politik Islam, Jakarta, Pustaka Inrmasa, 2009. Hal.

Al-Mawdudi menyatakan bahwa prinsip-prinsip Islam mencakup moral, etika, serta pedoman dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi.⁴⁴ Islam mengajarkan nilai-nilai kebaikan dalam berkeluarga, berinteraksi dalam masyarakat, dan membentuk pemerintahan yang baik.⁴⁵

Hujjatul Islam Al-Ghazali juga mengemukakan bahwa agama dan pemimpin tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, Al-Ghazali mendukung keterlibatan ulama dalam menciptakan ketertiban dunia dan kesejahteraan.⁴⁶ Walaupun Al-Ghazali mendukung peran ulama dalam politik, namun ia tidak menganggap wajib bagi ulama untuk menjadi pemimpin tertinggi. Tugas utama ulama adalah melakukan pengawasan terhadap penguasa yang bertindak sewenang-wenang, memastikan pemimpin yang terpilih menjalankan tugasnya dengan adil, profesional, dan amanah, serta melindungi rakyat dari kezaliman dan kejahatan. Al-Ghazali juga menyatakan bahwa jika seorang ulama meninggal saat menjalankan tugasnya tersebut, ia dianggap sebagai syahid.⁴⁷

Ulama sebagai pemegang tongkat estafet tugas kenabian yang diutus oleh Allah, bertanggung jawab untuk memimpin umat manusia dalam menyebarkan dan mengajarkan nilai-nilai peradaban serta menjaga harmonisasi kehidupan manusia.⁴⁸ Menurut K.H. Hasyim Muzadi, secara umum tugas utama ulama dapat diuraikan menjadi tiga hal berdasarkan Alquran surah al-A'raf (7): 157.

Pertama, melakukan amar ma'ruf nahi munkar (memerintah yang baik dan mencegah yang mungkar).

Kedua, menjelaskan soal halal dan haram.

⁴⁴ Ahmad Sylabi, *Islam Dalam Timbangan*, Ter. Abu Laila dan Muhammad Tohir, Bandung, al-Ma'arif, 1982. Hal. 235

⁴⁵ Hasbullah ry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta. UI Press, 1998. Hal. 321

⁴⁶ Al-Ghazali, 1991, *Ihyâ' Ulûm al-Dîn*, Dar al-Fikr, Beirut, Juz I, hal : 27

⁴⁷ Al-Ghazali, 1991, *Ihyâ' Ulûm al-Dîn*, Dar al-Fikr, Beirut, Juz II,, ham : 371

⁴⁸ Hadits dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah –shallallâhu ‘alayhi wa sallam- bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

“*Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan keshalihan akhlak.*” (HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (no. 8952), lihat: Al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad* (no. 273), al-Bayhaqi dalam *Syu'ab al-Îmân* (no. 7609), al-Khara'ith dalam *Makârim al-Akhlâq* (no. 1), dan lainnya)

Ketiga, membebaskan umat dari beban yang mengimpit dan belenggu yang memasung mereka.⁴⁹

Dalam menjalankan tugas ini, ulama diharapkan tidak hanya terpaku pada pengajaran dan pengembangan ilmu, tetapi juga aktif berperan dalam kehidupan sosial. K.H. Said Aqil Siradj menjelaskan bahwa peran sosial ulama meliputi pemeliharaan masyarakat, pengayoman terhadap masyarakat, dan menunjukkan jalan yang benar.⁵⁰

Secara historis dan sosiologis, ulama di Indonesia telah memainkan peran yang sangat beragam, tidak hanya dalam ranah keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan sosial kemasyarakatan, tetapi juga dalam aspek ekonomi dan politik.⁵¹ Keterlibatan ulama dalam politik di Indonesia sudah dimulai sejak awal berdirinya kerajaan Islam. Para ulama tidak hanya terlibat dalam urusan keagamaan, tetapi juga memberikan nasihat spiritual kepada raja dan memberikan legitimasi politik di kalangan masyarakat yang memeluk Islam.⁵² Contohnya, di Samudera Pasai pada tahun 1345, para ulama duduk bersama dengan sekretaris, pemimpin tentara, komandan, dan pembesar kerajaan dalam satu ruangan pertemuan.⁵³ Begitu juga di Kerajaan Demak, Raja menempatkan ulama dalam sebuah lembaga perkumpulan ulama yang disebut "ahlu halli wal

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجَلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
عَنْ وَتَصَرَّوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

157. (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. (al.'A'raf. 157) <https://www.republika.co.id/berita/qaqipi440/inilah-misi-ketiga-kerasulan-nabi-muhammad-saw>.

⁵⁰ <https://www.jawapos.com/nasional/04/05/2019/said-aqil-ingatkan-peran-penting-ulama-dalam-kehidupan-berbangsa/>. Di akses pada tanggal 11 November 2020

⁵¹ Fatimah Zuhrah, Pergeseran Peran Dan Posisi Ulama Pada Masyarakat Melayu Di Tanjung Pura Kabupaten Langkat, HIKMAH, Vol. XII, No. 1, 2016. Hal. 90

⁵² Jajat Burhanudin, Islam dalam Arus Sejarah Indonesia. Penerbit Kencana Cet. Ke-1 Tahun 2017

⁵³ [Ayang Utriza Yakin](#), Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M. Penerbit Prenada Media Grup, Tahun 2016

aqdi". Melalui lembaga tersebut, para ulama memiliki hak untuk memutuskan bukan hanya masalah agama, tetapi juga urusan kenegaraan dan segala hal yang berkaitan dengan kaum Muslimin. ⁵⁴

Tugas sosial yang dijalankan ulama dalam pembinaan umat menurut Abu Baker A. Bagader, terkadang melebihi dari tugas utamanya yaitu pendidikan moral dan keagamaan.⁵⁵ Najib Kailani juga menegaskan bahwa:

“Ulama telah lama membuktikan diri sebagai aktor penting yang berpengaruh secara politis, sosiologis dan kultural terhadap dinamika historis masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah artikulasi dan interpretasi mereka terhadap relasi agama dan negara”.⁵⁶

Hal ini juga di tegaskan oleh **Noorhadi Hasan**, *Guru besar dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta* berkata:

“Ulama merupakan aktor berpengaruh secara politis, sosiologis, dan kultural, serta turut menentukan dinamika historis perjalanan bangsa. Mereka memelopori perjuangan mendirikan negara bangsa dan mengawal eksistensinya hingga hari ini. Namun ulama juga berdiri di depan mengusung gerakan Islam politik yang berpotensi merongrong negara bangsa. Mereka tampil menjadi ideolog, pelopor, dan aktor utama gerakan-gerakan Islam politik di negeri ini.”⁵⁷

Dengan demikian, peran ulama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia tidak hanya terbatas sebagai pemimpin ritual keagamaan, guru agama, mufti, qâdi atau hakim, dan mediator, tetapi juga

⁵⁴ Ayang Utriza Yakin, *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M.*

⁵⁵ Abu Baker A. Bagader, (ed.), *The Ulama in the Modern Muslim Nation-State*, (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement in Malaya, 1983)

⁵⁶ Najib Kailani, dkk, *Meneroka Wacana Islam Publik dan Politik Kebangsaan Ulama di Kota-kota Indonesia, didalam ULAMA, POLITIK, DAN NARASI KEBANGSAAN: Fragmentasi Otoritas Keagamaan di Kota-kota Indonesia*, Jogjakarta, Penerbit: Pusat Pengkajian Islam Demokrasi dan Perdamaian (PusPIDeP), Cetakan I, 2019, hal. XIX.

⁵⁷ Nurhaidi Hasan. Ulama, Islam, Politik dan Negara. <https://kolom.tempo.co/read/1318925/ulama-islam-politik-dan-negara-bangsa/full&view=ok>. Di unduh pada tanggal 26 November 2020. Jam. 15.05

meluas ke bidang politik, ekonomi, dan budaya. Peran ini menjadikan ulama sebagai tokoh berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah bahkan menyatakan bahwa pembentukan masyarakat Muslim dan kelestariannya tidak dapat dipisahkan dari peran ulama. Ulama merupakan pusat dalam hubungan antara Islam dengan umat Islam. Mereka adalah figur yang selalu hadir dalam menangani setiap permasalahan umat Islam dalam sejarah, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan, politik, sosial, budaya, dan pendidikan.⁵⁸

Kepatuhan dan kepercayaan yang tinggi masyarakat kepada ulama tidak hanya disebabkan oleh faktor keilmuan dan status mereka sebagai pewaris tugas kenabian, tetapi juga oleh faktor kharisma yang melekat pada diri seorang ulama. Max Weber menyatakan bahwa kharisma memiliki pengaruh yang besar terhadap ketaatan seseorang kepada pemimpinnya.⁵⁹ Lebih lanjut, kharisma para ulama seringkali dipercayai sebagai hasil dari kemampuan yang bersifat *divinely inspired gift* (karunia yang diinspirasi ilahi), yang dapat mengekspresikan diri dalam bentuk karomah atau kemampuan supranatural, serupa dengan mukjizat atau kemampuan untuk meramalkan peristiwa-peristiwa di masa mendatang.⁶⁰

Di Indonesia, menurut Din Syamsudin, terdapat tiga tipologi pemikiran politik yang dominan. Pertama, tipologi formalistik, yang menekankan penggunaan simbol-simbol Islam dalam politik, baik dalam ideologi organisasi maupun dalam simbolisme agama. Kedua, tipologi substantivistik, yang lebih menekankan pada substansi atau inti ajaran Islam. Ketiga, tipologi fundamentalis, yang bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai Islam dalam realitas politik sebagai respons terhadap kegagalan tipologi sebelumnya dalam mencapai kemajuan dan perlawanan politik Islam di tingkat internasional.⁶¹

⁵⁸Rosihan Anwar dan Andi Bahrudin Malik, *Ulama dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Keagamaan*, (Jakarta: Pringondani Berseri, 2003), hal. 13

⁵⁹Herman Arisandi, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik Sampai Modern*, Yogyakarta, IRCiSoD, 2015, hlm. 70.

⁶⁰Gari A. Yuki, *kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta: Prenhalindo, 1998, hlm. 268.

⁶¹Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru Perubahan Politik dan Keagamaan*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1993. Hal. 4

Perdebatan di kalangan masyarakat mengenai keterlibatan ulama dalam politik praktis seringkali berkaitan dengan perdebatan di kalangan intelektual Islam (ulama) mengenai relasi antara agama dan negara secara teoritis dan konseptual. Debat ini seringkali memicu pertentangan dan perpecahan di kalangan umat Islam, terutama terkait dengan isu negara dan pemerintahan.⁶² Perdebatan panjang terutama seputar relasi agama dan negara yang telah memetahkan tiga aliran yaitu:

1. Aliran Integralistik atau teokrasi

Teori tersebut menyatakan bahwa agama dan negara merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, domain agama juga mencakup domain negara. Pemerintahan negara dijalankan berdasarkan kedaulatan Tuhan (divine sovereignty), karena kedaulatan tersebut berada di tangan Tuhan (teokratis). Konsep ini menghasilkan pandangan negara agama (din wa dawlah), di mana negara diatur sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Tokoh-tokoh utama yang menganut pandangan ini antara lain Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, dan al-Mawdudi. Pandangan semacam ini umumnya diadopsi oleh kelompok-kelompok Syi'ah.

2. Aliran Simbiotik.

Teori ini menyatakan bahwa hubungan antara agama dan negara bersifat saling membutuhkan dan timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai wadah untuk mengembangkan dan melestarikan ajaran-ajarannya, sementara negara memerlukan agama sebagai instrumen untuk membina moral dan etika dalam masyarakat. Salah satu tokoh yang menganut pandangan ini adalah Dr. Muhammad Husayn Haikal.

3. Aliran Sekularistik.

Paham sekularisme dengan tegas menyatakan bahwa agama dan negara adalah dua entitas yang berbeda dan memiliki domain yang terpisah. Keduanya memiliki wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing, dan

⁶² Rosmaniah Hamid,. Makalah Pemikiran Islam tentang Hubungan Agama dan Negara. 2011. Hal. 6

tidak dapat disatukan menjadi satu. Menurut pandangan ini, semua aturan hukum negara bersumber dari pemikiran dan kesepakatan manusia, dan tidak bergantung pada ajaran agama atau firman Tuhan. Tokoh-tokoh yang menganut paham ini antara lain Aly Abdul al-Raziq dan Dr. Thaha Husayn.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perdebatan yang panjang di kalangan ilmuwan tentang peran agama dalam kehidupan bernegara tidak hanya mencerminkan ketidaksepakatan yang belum tuntas mengenai konsep politik dan negara dalam Islam, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap perilaku politik umat Islam, terutama dalam sikap mereka terhadap ulama yang terlibat dalam politik praktis.

Meskipun secara resmi Indonesia menganut paham simbolik dalam Konstitusinya, namun secara pemikiran dan ideologis di lapangan, tidak sedikit masyarakat awam maupun tokoh intelektual cenderung memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang diterapkan oleh negara.

Jambi merupakan salah satu provinsi yang memiliki sejarah panjang yang tak terlepas dari perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah Jambi dimulai dari masa kepemimpinan Kerajaan Melayu Jambi hingga periode penjajahan, di mana hubungannya dengan sejarah Nusantara sangat kuat. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika setelah kemerdekaan Indonesia, yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, masyarakat Jambi bergabung menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

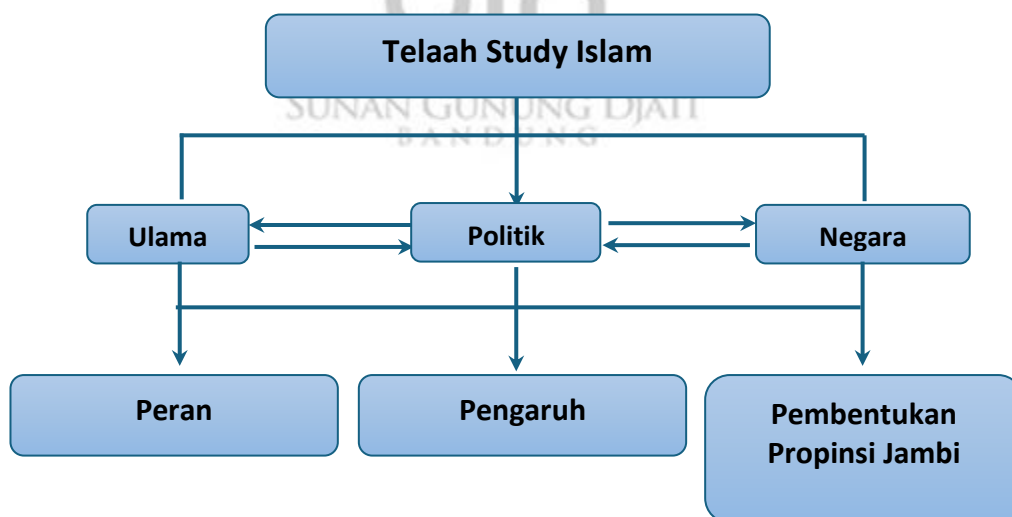
Sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, keberadaan Islam telah menjadi identitas dasar yang mencakup setiap aspek kehidupan masyarakatnya di Jambi. Identitas keislaman ini tercermin dalam moto "Adat bersendikan syara, dan syara bersendikan kitabullah", yang berarti bahwa syariat Islam mengatur adat istiadat yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga menjadi

bagian integral dari kehidupan masyarakat Melayu Jambi, yang sulit dipisahkan dan melekat dalam kehidupan sehari-hari.⁶³

Ulama di masyarakat Jambi bukan hanya merupakan simbol pengajaran agama, tetapi juga menjadi panutan dalam kehidupan sosial. Peran dan kontribusi ulama dalam sejarah Jambi tidak dapat diabaikan, baik pada masa sebelum maupun sesudah menjadi bagian dari Indonesia.

Sebelum Jambi menjadi bagian propinsi Indonesia, ulama memiliki peran besar dalam pengembangan dakwah dan pengajaran ajaran Islam. Mereka juga aktif dalam ranah politik, terutama dalam proses pembentukan Jambi sebagai propinsi.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini mengambil pandangan pemikiran Islam sebagai alat untuk menganalisis relasi antara ulama dan politik, khususnya peran politik ulama di Jambi. Konsep peran ulama dalam kontes politik dijabarkan dalam tiga aspek praktis: peran politik ulama, pengaruh politik ulama, dan peran ulama dalam pembentukan menjadi propinsi. Semua akan dijelaskan dalam bagan di bawah ini.



Bagan 1 Kerangka Konseptual Penelitian

⁶³ Judith A. Nagata, "What is the Malay?: Situational Selection of Ethnic Identity in a Plural Society", *American Ethnologist*, 1, 2 (1974), hlm. 331-350.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran literatur baik dari sumber nasional maupun lokal, terdapat beragam penelitian dan kajian tentang ulama yang berkembang pesat. Kajian ini mencakup berbagai aspek keilmuan:

1. Penelitian tentang peran ulama dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia, yang membahas kontribusi mereka dalam pengembangan kurikulum, metode pengajaran, serta pendirian lembaga pendidikan formal dan non-formal.
2. Kajian tentang aktivitas ekonomi ulama, termasuk peran mereka dalam perdagangan, investasi, dan pengelolaan keuangan, serta dampaknya terhadap perkembangan ekonomi lokal dan nasional.
3. Literatur mengenai pengaruh ulama dalam mempertahankan dan mengembangkan budaya lokal, baik dalam hal seni, sastra, maupun tradisi keagamaan, serta upaya mereka dalam menjaga identitas budaya masyarakat.
4. Penelitian tentang keterlibatan ulama dalam ranah politik, termasuk peran mereka dalam menyusun kebijakan publik, memberikan nasihat kepada pemerintah, serta aktif dalam gerakan sosial dan politik untuk advokasi kepentingan umat Islam.

Dalam penelitian ini penulis focus kepada penelitina yang berkaitan dengan ulama dalam ranah politik. Secara spesifik eksistensi ulama di Jambi dalam relasi dengan negara dari masa kerjaan hingga pembentukan Jambi menjadi propinsi. Berikut adalah beberapa literatur yang relevan dalam bidang tersebut:

1. Gunawan, E. (2017). Relasi Agama Dan Negara Perspektif Pemikiran Islam. Dalam penelitian ini, Gunawan mengkaji hubungan antara agama dan negara dari perspektif pemikiran Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa tokoh atau pemikir Muslim, seperti Nurcholish Madjid dan Abdur Rahman Wahid, sepakat bahwa

terdapat relasi yang konstruktif antara agama dan negara, yang sering dipisahkan oleh kalangan revivalis. Beberapa indikator yang diungkapkan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Islam memberikan prinsip-prinsip untuk terbentuknya suatu negara melalui konsep khalifah, dawah, atau hukūmah.
- b. Islam menekankan pada nilai-nilai demokrasi seperti kebenaran dan keadilan.
- c. Islam menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menegaskan bahwa hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir adalah hak kemerdekaan beragama.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan Hak Asasi Manusia dalam sebuah negara, karena hak tersebut tidak boleh diganggu atau dirampas dari individu yang memiliki hak tersebut.⁶⁴

2. Abdullah. (2014). Hubungan Agama dan Negara: Konteks ke-Indonesiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, terutama pada masa Orde Baru. Pada periode tersebut, terjadi restrukturisasi politik yang bertujuan untuk mengurangi peran politik masyarakat guna menjaga stabilitas. Militer, terutama ABRI, mendominasi sistem politik yang semakin menguat. Birokrasi dan partai politik seperti Golkar digabungkan menjadi dua partai utama, yaitu PPP dan PDI. Elite politik diperbanyak melalui rekrutmen yang tidak selalu transparan, bahkan melalui metode paksaan tidak langsung. Pemerintah juga mendorong depolitisasi massa dengan menekankan pada pembangunan nasional dan modernisasi.

Abdullah berusaha merekonstruksi konsep hubungan antara agama dan negara sebagai panduan untuk pembangunan nasional, dengan harapan dapat menghindari benturan antara kedua institusi tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa membentuk negara adalah kewajiban, tetapi bentuk

⁶⁴ Edi Gunawan, Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam. KURIOSITAS, Vol. 11, No. 2, Desember 2017. Lihat; <file:///C:/Users/userx1/Downloads/589-Article%20Text-928-1-10-20190131.pdf>. Di Akses Pada tanggal 12 Maret 2024

simbolisnya tidak dianggap wajib; yang terpenting adalah menerapkan nilai-nilai ajaran agama untuk menghindari kontradiksi antara esensi ajaran Islam dan perilaku umatnya. Konsep demokrasi dianggap sesuai dengan Islam karena menekankan kebenaran, keadilan, supremasi hukum, dan kebebasan dalam semua aspek kehidupan. Hak asasi manusia diakui sebagai hak dasar yang diberikan oleh Tuhan, menunjukkan respons Islam terhadap hak asasi dengan menegaskan kesetaraan dalam hukum, keadilan, dan kebebasan bagi semua individu.⁶⁵

3. Bakhtiar Effendi dalam bukunya yang berjudul "Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia" menguraikan secara mendalam dan komprehensif hubungan antara Islam dan negara. Karyanya ini menjadi penting dalam penelitian ini karena berawal dari disertasinya yang berjudul "Islam and the State: The Transformation of Islamic Political Ideas and Practices in Indonesia" pada tahun 1994. Bakhtiar Effendi menegaskan bahwa Islam tidak hanya terkait dengan aspek spiritual semata, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat dan negara. Menurutnya, Islam memberikan sistem yang menyeluruh dan terperinci dalam ranah sosial, ekonomi, dan politik.

Secara spesifik, Bakhtiar Effendi mengulas hubungan politik antara Islam dan negara di Indonesia. Pemikirannya terinspirasi dari fenomena di berbagai negara Muslim setelah berakhirnya kolonialisme Barat pada pertengahan abad ke-20, di mana negara-negara tersebut mengalami kesulitan dalam mengembangkan sintesis antara gerakan politik Islam dengan struktur negara. Bakhtiar Effendi juga mengangkat permasalahan mengenai konflik yang tak pernah selesai antara agama (Islam) dan negara, serta upaya untuk mencari jalan keluar dari konflik tersebut. Dia menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan permusuhan tersebut, serta mencari solusi untuk mengubah hubungan politik antara Islam dan negara menjadi lebih harmonis dan saling menguntungkan.

⁶⁵ Abdullah, "Hubungan Agama dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan", Jurnal Politik Profetik, Volume 4 Nomor 2, (2004).

Dalam menjawab teka-teki ini, Bakhtiar Effendi menegaskan bahwa ada kecenderungan beberapa pengamat politik Islam untuk melihat hubungan antara Islam dan politik sebagai sesuatu yang bersifat monolitik. Mereka memandang Islam sebagai agama politik yang intrinsik, sehingga memandang konflik antara ortodoksi dan sinkretisme, bukan sebagai perbedaan visi di kalangan elite negara mengenai cita-cita Indonesia yang diinginkan.⁶⁶

4. Mustafa (2018). *Rechtstat dan Konstitusionalisme Dalam Pemikiran Abdurahman Wahid dan Hasyim Muzadi*. Disertasi ini bertujuan untuk mengungkap pemikiran Abdurahman Wahid dan Hasyim Muzadi mengenai Rechtstat dan konstitusionalisme, serta kontribusi mereka terhadap hubungan agama dan negara dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa:

- a. Pemikiran Abdurahman Wahid memberikan kontribusi yang relevan dengan konteks keadilan dalam bidang hukum, politik, dan budaya. Pemikirannya dapat dipahami dalam tiga bentuk utama: Liberalisme, demokratis, dan Universalisme.
- b. Hasyim Muzadi juga memberikan kontribusi dalam hubungan agama dan negara, dimana ia menekankan bahwa dalam formal negara Indonesia, Islam tidak harus dijadikan landasan hukum. Baginya, Islam lebih menghendaki aksi dalam mencapai kesejahteraan tanpa memandang batasan agama, suku, budaya, dan ras, sebagai realisasi dari konsep Rahmatan Lil alamin.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan historis-normatif serta jenis data kualitatif. Melalui pendekatan ini, pemikiran-pemikiran Abdurahman Wahid dan Hasyim Muzadi dalam konteks Rechtstat dan konstitusionalisme dapat dipahami lebih dalam, serta

⁶⁶Bakhtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Penerbit : Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011.

kontribusinya terhadap hubungan agama dan negara dalam konteks hukum Islam di Indonesia dapat dianalisis secara komprehensif.⁶⁷

5. Dalam disertasinya yang kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul "Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad 17 dan 18", Azyumardi Azra mengeksplorasi aspek sejarah terkait transmisi reformisme Islam ke Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama:

- a. Bagaimana jaringan keilmuan terbentuk antara ulama Timur Tengah dengan murid-murid Melayu-Indonesia, serta sifat, karakteristik, dan ajaran intelektual yang berkembang dalam jaringan tersebut?
- b. Apa peran ulama Melayu-Indonesia dalam mentransmisikan konten intelektual dari jaringan ulama tersebut ke Nusantara, beserta modus transmisi yang digunakan?
- c. Apa dampak yang lebih luas dari jaringan ulama terhadap perkembangan Islam di Nusantara?

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jaringan ulama internasional merupakan komunitas ulama dari berbagai negara yang berkumpul di Timur Tengah, terutama di Makkah dan Madinah, untuk mengkaji masalah keagamaan dan keilmuan. Ulama dari kepulauan Nusantara berkontribusi dalam mengembangkan tradisi keagamaan dan keilmuan di Timur Tengah, memberikan nuansa baru bagi tradisi di Nusantara.

Kaitan dasar ulama dalam jaringan ini bersifat akademis, dengan pola vertikal antara guru dan murid serta pola horizontal antara sesama murid. Ajaran atau tendensi intelektual yang berkembang dalam jaringan ini adalah neo-Sufisme, yang menonjolkan kesinambungan dan perubahan. Ulama Melayu-Indonesia seperti Hamzah Al-Fansuri, Syams Al-Din Al-Samatrani, Nur Al-Din Al-Raniri, Abd Al-Rauf Al-Sinkili, dan Muhammad Yusuf Al-Maqasari menjadi perintis pembaruan Islam di Nusantara. Mereka

⁶⁷ Mustafa dalam Disertasi yang berjudul "Rechtstat dan Konstitusionalisme Dalam Pemikiran Abdurahman Wahid dan Hasyim Muzadi. Madania 22. No. 1, 2018

membawa diskusi sejarah Islam ke wilayah yang luas, dari Sulawesi Selatan dan Jawa Barat (Banten) hingga Arabia, Sri Lanka, dan Afrika Selatan.

Modus transmisi ulama perintis ini menekankan keselarasan antara aspek hukum dan mistis Islam. Penyebaran pembaruan Islam di Nusantara pada abad ke-17 dan ke-18 mengubah bentuk keyakinan dan praktik-praktik yang tidak Islami menjadi sesuai dengan keyakinan dan praktik kaum Muslim pada periode selanjutnya.⁶⁸

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian Azyumardi Azra tersebut terlihat jelas bahwa gerakan Ulama Nusantara tidak terlepas dari pengaruh gerakan Ulama di Timur Tengah. Meskipun penelitian ini sangat komprehensif kajian Ulama berakaitan dengan hubungan dengan jaringan Timur Tengah, tetapi dalam penelitian ini belum ada sedikitpun yang menyinggung keadaan Ulama di Jambi.

Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elit Politik Muslim dalam Sejarah Indonesia.⁶⁹ Buku yang ditulis Jajat Burhanuddin yang terbit tahun 2012 ini mengulas sejarah peran serta pergumulan ulama dalam arena politik di Indonesia. Penelitiannya menelusuri upaya para ulama dalam memperkuat peran serta legitimasi sosio-intelektual dan budaya mereka di Indonesia. Poin penting yang disoroti adalah bahwa posisi strategis ulama tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari perjuangan panjang melalui berbagai proses perubahan sosial-politik dalam sejarah Indonesia. Ini termasuk periode awal perkembangan Islam, masa kolonialisme Belanda, hubungan dengan Timur Tengah, serta zaman pergerakan. Semua periode ini menjadi fondasi sosiohistoris bagi keterlibatan terus-menerus elite Muslim dalam menerjemahkan dan mendefinisikan Islam bagi masyarakat Muslim Indonesia, dengan bahasa konseptual yang terus berubah. Penting untuk dicatat bahwa salah satu

⁶⁸ Azyumardi Azra, Jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII melacak akar-akar pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, Bandung : , Mizan, 1994, Cet.1

⁶⁹ Jajat Burhanuddin, Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Elit Politik Muslim Dalam Sejarah Indonesia, Jakarta, Mizan, Cetakan I, Juni 2012

aspek yang relevan dengan keterlibatan ulama dalam politik adalah tujuan masuknya mereka ke ranah politik, yang dipandang sebagai pilihan yang mulia. Penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan historis, yang menyajikan data-data yang bersifat historis, dan bukan menggunakan pendekatan sosiologi politik. Pendekatan ini memungkinkan pembaca untuk memahami konteks sejarah yang melingkupi peran serta pergumulan ulama dalam politik Indonesia.

7. Jang A. Muttalib menulis tentang *Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial di Jambi pada perempat pertama Abad ke 20*. Didalam penelitiannya beliau menulis tentang perlawanan-perlawanan rakyat Jambi menentang penjajah Belanda yang menimbulkan semangat anti kafir pada tahun 1914.⁷⁰
8. Pada tahun 2019, Benny Agusti Putra meneliti mengenai Transformasi Budaya Islam Melayu di Jambi dari Masyarakat Tradisional ke Masyarakat Urban dalam disertasinya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis fenomena ini, dengan fokus pada perubahan budaya Islam Melayu Jambi dari konteks tradisional ke urban. Dalam analisisnya, ia memanfaatkan pendekatan sejarah dan fenomenologi, serta teori Pierre Bourdieu, terutama konsep "Arena", untuk memahami perubahan budaya tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat urban dalam konteks Islam Melayu di Jambi dari berbagai aspek budaya. Putra mempelajari sejarah dan perkembangan Islam Melayu di Jambi bersama dengan ciri khas masyarakat tradisional dan urban yang mengamalkan Islam Melayu di daerah tersebut.

Dalam analisisnya, Putra menyoroti pengaruh sufiisme dan konsep "Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi kitabullah" dalam struktur masyarakat tradisional Islam Melayu di Jambi. Dia juga menekankan pengaruh modal "capital", terutama dari Kesultanan Jambi dan Kolonial

⁷⁰ Jang A. Muttalib, *Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial di Jambi Pada Perempat Pertama Abad ke 20*, (Jakarta: Prisma : 1980)

Belanda, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat tradisional. Di sisi lain, Putra memperhatikan pengaruh modernisasi terhadap masyarakat urban Islam Melayu di Jambi, yang tercermin dalam konteks Kota Jambi saat ini. Modal "capital" dari individu yang mendukung habitus mereka memainkan peran penting dalam menentukan dominasi budaya Islam dalam arena sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan di masyarakat urban.

Penelitian ini mengidentifikasi hubungan antara perubahan dari masyarakat tradisional ke urban di Jambi, yang menghasilkan fenomena baru yang disebut Post-Islamisme. Hal ini mencerminkan upaya untuk membawa masyarakat Islam Melayu Jambi menuju modernitas untuk memperkuat budaya Islam di masa depan.⁷¹

9. Dalam jurnal ilmiahnya berjudul "Kerajaan Jambi dan Pengaruh Islam", Arif Rahim mengkaji pengaruh Islam terhadap Kerajaan Jambi yang terletak di jalur perdagangan internasional. Penelitian ini menarik karena mempertimbangkan masa pertumbuhan kerajaan tersebut seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Dengan pendekatan multi dimensional dan menggunakan metode sejarah yang ilmiah, penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan terhadap permasalahan utama yang diajukan serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya sejarah lokal Jambi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerajaan Jambi merupakan salah satu kerajaan di Nusantara yang berdiri dari akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-20. Kerajaan ini mulai menerima pengaruh Islam sejak awal berdirinya. Putri Selaro Pinang Masak, sebagai pendiri kerajaan, memeluk agama Islam setelah menikah dengan Ahmad Salim Datuk Paduka Berhalo, seorang Muslim asal Turki. Sejak itu, Kerajaan Jambi menjadikan Islam sebagai agama resmi, di mana raja memiliki kedudukan sebagai kepala

⁷¹ Benny, Agusti Putra Transformasi Budaya Islam Melayu Jambi Dari Masyarakat Tradisi Menuju Masyarakat Urban. Doctoral thesis, UIN Raden Fatah Palembang, 2019. <https://repository.radenfatah.ac.id/7335/>. Diakses Pada Tanggal 11 Maret 2024

negara sekaligus pemimpin agama. Orangkayo Hitam, seorang raja, juga terlibat aktif dalam penyebaran agama Islam.

Dampak Islam terlihat dalam berbagai aspek kehidupan kerajaan dan masyarakat Jambi. Secara politik, terjadi perubahan sebutan dari kerajaan menjadi kesultanan, raja menjadi sultan, dan nama-nama raja menggunakan bahasa Arab. Hukum dan aturan negara juga didasarkan pada ajaran Islam. Dalam bidang ekonomi, pengaruh Islam tercermin dalam prosedur perdagangan, meskipun terkadang terjadi pelanggaran terhadap larangan riba. Sementara dalam bidang sosial dan budaya, pengaruh Islam terlihat dalam cara berpakaian, hubungan sosial, dan upacara serta kesenian yang kental dengan doa-doa Islam dan shalawat nabi.⁷²

10. Dalam jurnal yang berjudul "Keorganisasian Perkumpulan Ulama Jambi", Syamsir Salam meneliti peran Tsamratul Insan sebagai organisasi sosial yang didirikan oleh ulama, yang menjadi cikal bakal munculnya ide pendirian madrasah di daerah Jambi. Penelitian ini memfokuskan pada sejarah pendidikan dan madrasah-madrasah di Kota Jambi.

Salam menyoroti pentingnya peran Tsamratul Insan dalam mengembangkan pendidikan di Jambi, khususnya melalui pendirian madrasah. Dalam penelitiannya, dia menggali asal-usul organisasi ini serta peran ulama dalam menyokongnya. Selain itu, Salam juga memperhatikan dampak dan kontribusi Tsamratul Insan terhadap perkembangan pendidikan di Jambi.

Dengan fokus pada sejarah pendidikan dan madrasah di Kota Jambi, Salam memberikan gambaran tentang bagaimana Tsamratul Insan menjadi titik awal dari upaya-upaya dalam pendidikan Islam di wilayah tersebut. Penelitiannya menguraikan bagaimana organisasi ini membantu membangun fondasi bagi pendirian madrasah-madrasah di daerah Jambi

⁷² Arif Rahim, Kerajaan Jambi dan Pengaruh Islam, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022. Lihat. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/2985/1346>. Di Akses Pada Tanggal 8 Maret 2024

dan bagaimana hal tersebut berpengaruh pada perkembangan pendidikan Islam di wilayah tersebut.⁷³

11. Dalam penelitiannya tentang Gerakan Ulama di Jambi, Syamsir Salam mengkaji lanjutan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Jang A. Muthalib mengenai peran Ulama Jambi dalam perlawanan terhadap penjajah. Dalam penelitiannya, Salam mengungkapkan strategi yang diambil untuk mencegah terjadinya gejolak sosial atau konflik bersenjata antara Belanda dan penduduk pribumi di Jambi. Salah satu strategi yang diungkapkan adalah dengan melakukan kategorisasi terhadap berbagai bentuk dan organisasi yang sedang berkembang di masyarakat. Salam mengidentifikasi pentingnya pengelompokan dan organisasi yang terstruktur dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik. Melalui penelitiannya, dia menguraikan bagaimana pendekatan ini menjadi langkah strategis untuk meminimalkan potensi gejolak sosial dan peperangan dengan Belanda, serta bagaimana Ulama Jambi berperan dalam merumuskan strategi tersebut.

Dengan mengembangkan gagasan dari penelitian sebelumnya, Salam menyajikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang peran Ulama Jambi dalam konteks sejarah perlawanan terhadap penjajah dan upaya memelihara stabilitas sosial di masyarakat Jambi. Ini memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif tentang dinamika politik dan sosial di wilayah tersebut pada periode yang bersangkutan.

12. Irmawati Sagala dalam penelitiannya mengenai "Islam dan Adat dalam Sistem Pemerintahan Jambi Masa Kesultanan dan Kolonial pada Tahun 1855-1942" bertujuan untuk menjelaskan interaksi antara Islam dan adat dalam sistem pemerintahan di negeri Jambi selama periode tersebut. Penelitian ini penting karena mempertimbangkan karakter keislaman dan gerakan anti-kolonial yang berdampak pada masyarakat Jambi.

⁷³ Samsir Salam, *Perukunan Tsamaratul Insan Sebagai Perintis ke Arah Pendidikan Formal Islam di Kodya Jambi*, (Jakarta : Badan Litbang Departemen Agama RI, 1979), hal 23

Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma kualitatif dengan pendekatan Ilmu Politik yang didukung oleh pendekatan Sejarah, serta metode Filologi untuk menganalisis sumber data primer berupa manuskrip. Data dikumpulkan melalui inventarisasi naskah, studi kepustakaan, wawancara, dan penelitian lapangan sebagai pendukung. Teori tentang sistem politik-pemerintahan Islam, model relasi hukum Islam dan hukum adat, serta relasi kekuasaan dalam praktik hukum dan pemerintahan digunakan untuk menganalisis permasalahan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintahan Kesultanan Jambi pada periode tersebut memiliki karakter yang konsisten dengan Islam memainkan peran penting dalam sistem pemerintahan. Namun, sejak tahun 1888 M, dua aspek terakhir mengalami distorsi. Dalam konteks penerapan hukum Islam, terjadi integrasi antara syariat dan adat yang dianggap sejalan dengan syariat. Namun, pemerintah kolonial Belanda melakukan perubahan signifikan setelah menaklukkan Jambi pada tahun 1904 M, termasuk pembubaran kesultanan yang menghapus karakter adat-Islam dalam pemerintahan.

Penelitian ini memiliki keunikan dalam penggunaan sumber data utama yang lebih mengandalkan naskah-naskah lokal daripada laporan-laporan kolonial. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh Islam dalam politik-pemerintahan Kesultanan Jambi lebih substansial daripada yang sebelumnya diperkirakan.⁷⁴

Berdasarkan literatur yang disajikan, terdapat beberapa penelitian tentang relasi ulama dan Negara, dan secara spesifik penelitian tentang ulama di Jambi. Dalam penelitian tersebut secara spesifik tidak ditemukan atau belum ada penelitian yang serupa berakitan dengan judul sudah penulis teliti. Walaupun ada penelitian ulama di Jambi, tapi hanya melihat peran ulama dalam perjuangan melawan penjajahan dan peran ulama dalam aspek social dan pendidikan. Maka

⁷⁴ Irmawati Sagala. Islam dan adat dalam sistem pemerintahan jambi masa kesultanan dan kolonial pada tahun 1855-1942, disertasi, sekolah pascasarjana universitas islam negeri (uin) syarif hidayatullah jakarta, 2020.

itu penting bagi penulis meneliti tentang peran ulama dalam ranah politik di propinsi Jambi.

Perbedaan yang dapat ditemukan antara penelitian tentang dinamika relasi ulama dan negara yang berfokus pada Jambi dengan penelitian yang lebih umum tentang peran politik ulama dari masa kerajaan hingga masa kemerdekaan dan pembentukan provinsi Jambi. Berikut adalah beberapa perbedaan yang dapat disimpulkan:

1. **Fokus Penelitian:** Penelitian tentang dinamika relasi ulama dan negara di Jambi lebih spesifik dalam lingkungannya, dengan menyoroti konteks sejarah, politik, dan budaya yang khusus terjadi di wilayah Jambi. Sementara itu, penelitian tentang peran politik ulama dari masa kerajaan hingga masa kemerdekaan dan pembentukan provinsi Jambi memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup periode dan konteks yang lebih umum dalam sejarah politik Indonesia.
2. **Konteks Sejarah Lokal:** Penelitian tentang dinamika relasi ulama dan negara di Jambi menitikberatkan pada sejarah, budaya, dan dinamika politik yang spesifik terjadi di Jambi, termasuk peran ulama dalam konteks tersebut. Sementara itu, penelitian yang lebih umum tentang peran politik ulama mencakup berbagai konteks sejarah dari berbagai daerah di Indonesia.
3. **Peran Ulama dalam Politik Lokal:** Penelitian tentang dinamika relasi ulama dan negara di Jambi lebih menyoroti peran ulama dalam politik lokal, baik dalam konteks kerajaan maupun dalam masa kemerdekaan dan pembentukan provinsi Jambi. Sementara itu, penelitian yang lebih umum cenderung mencakup peran ulama dalam konteks nasional dan hubungan mereka dengan pemerintah pusat.
4. **Pengaruh Islam dalam Politik dan Kehidupan Masyarakat:** Penelitian tentang dinamika relasi ulama dan negara di Jambi mendalam mengenai pengaruh Islam dalam politik dan kehidupan masyarakat lokal, termasuk bagaimana Islam memengaruhi sistem pemerintahan, hukum, budaya, dan ekonomi di Jambi. Sementara itu, penelitian yang lebih umum tentang peran

politik ulama cenderung melihat pengaruh Islam dalam skala nasional dan peran ulama dalam perkembangan politik nasional.

Dengan demikian, penelitian tentang dinamika relasi ulama dan negara di Jambi memberikan wawasan yang lebih mendalam dan kontekstual tentang peran politik ulama dalam sejarah, politik, dan budaya Jambi, sementara penelitian yang lebih umum mencakup gambaran yang lebih luas tentang peran ulama dalam politik di Indonesia secara keseluruhan.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disampaikan, peneliti tidak menemukan hasil penelitian yang sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Secara umum, tulisan-tulisan yang ada tentang relasi agama dan negara cenderung fokus pada pemikiran tokoh Islam tertentu dalam konteks deskriptif. Meskipun beberapa tulisan mengulas secara historis tentang hubungan agama dan negara, namun pembahasannya cenderung pada masa Orde Baru.

Selain itu, dalam kajian tentang sejarah politik Jambi, baik yang menyangkut ulama maupun secara umum sejarah Jambi, fokus pembahasannya belum mencakup peran politik ulama dan relasinya dengan negara. Terutama dalam konteks keterlibatan ulama dalam pembentukan Provinsi Jambi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekosongan dalam literatur mengenai hubungan politik ulama dan negara, terutama dalam konteks sejarah politik Jambi dan pembentukan Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan adanya peluang yang besar bagi penelitian lebih lanjut dalam memperdalam pemahaman tentang peran ulama dalam dinamika politik dan pembentukan daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi.